

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kondisi Myanmar yang tidak stabil akibat kudeta militer ini mengganggu stabilitas negara-negara di dekatnya, beberapa negara yang memiliki hubungan dengan Myanmar terpaksa harus mengambil sebuah pilihan untuk menanggapi hal ini. Isu kemanusiaan yang utamanya menjadi perhatian bagi komunitas internasional ini membuat pihak militer banyak dikecam oleh pihak-pihak luar. Negara-negara lain dan organisasi internasional memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Myanmar, baik dengan menarik bantuan ekonomi maupun memutuskan hubungan kerja sama dalam segala bidang.

Cina sebagai negara tetangga sekaligus partner ekonomi terbesar bagi Myanmar ini tentunya menjadi salah satu aktor yang responnya ditunggu-tunggu oleh komunitas internasional. Dalam pertemuan tertutup yang dilakukan oleh PBB dalam merumuskan resolusi yang berisi sanksi terhadap Myanmar ini Cina memilih untuk memakai hak vetonya untuk menolak sanksi terhadap Myanmar dengan alasan non-intervensi dan Cina mengatakan bahwa urusan internal yang terjadi Myanmar ini harusnya diselesaikan sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Kebijakan Cina terhadap Myanmar pasca kudeta dipengaruhi oleh berbagai aspek kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Cina di Myanmar ini ditinjau dari beberapa aspek meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Kepentingan nasional yang harus dicapai oleh Cina melalui kerja sama dengan Myanmar ini

kemudian akan mendorong sebuah *Rational Choice* atau pilihan rasional yang diambil oleh pemerintah Cina. Pemerintah Cina ditekan oleh berbagai faktor dalam menentukan sikap dalam menanggapi kudeta militer di Myanmar ini. Saat itu, banyaknya korban yang berjatuh akibat kerusuhan penolakan kudeta di Myanmar membuat banyak pihak luar yang menunjukkan empati dan sisi kemanusiaannya dengan mengecam dan meminta pihak militer untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Cina sendiri berada di kondisi yang mengalami dilema akibat kejadian ini, sebagai negara yang bersinggungan langsung dengan Myanmar tentunya Cina mendapatkan dampak langsung dari kudeta militer ini.

Kepentingan ekonomi Cina terhadap Myanmar juga terancam akibat hal ini, berbagai investasi dan kerja sama yang sudah terjalin antara Cina dengan Myanmar ini harus dihentikan sementara karena adanya kerusuhan di Myanmar. Sedangkan dengan menimbang terkait dana yang telah dikeluarkan oleh Cina untuk investasi kepada Myanmar ini maka seharusnya kerja sama di antara keduanya harus berlanjut, proyek-proyek yang sudah berjalan juga harus segera dilanjutkan untuk menghindari resiko dan kerugian lebih besar. Selain itu, adanya kudeta ini menghambat proses perdagangan bagi Cina dan Myanmar yang mana keduanya juga sudah saling bergantung dalam ekspor-impor di beberapa sektor.

Kepentingan sosial dan politik yang dilindungi oleh Cina dengan menjaga baik hubungannya dengan Myanmar adalah ingin melindungi masyarakat Cina yang berada di Myanmar. Cina menginginkan kerja sama pihak militer Myanmar untuk menjaga perdamaian di wilayah perbatasan, menjaga proyek-proyek kerja sama keduanya, serta menjamin keselamatan masyarakat Cina di Myanmar. Cina

memilih untuk memveto kebijakan PBB yang hendak menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar serta memilih untuk mempertahankan hubungan baiknya dengan Myanmar ini agar pihak militer dapat kooperatif dengannya untuk menjaga kepentingan nasional kedua belah pihak.

Selain itu, Cina juga ingin menghalau pengaruh barat dalam kawasan Asia. Cina ingin memperluas dominasinya dan mempertahankan kebergantungan negara-negara lain terhadapnya termasuk Myanmar. Myanmar juga merupakan jalur tercepat bagi Cina untuk mencapai Samudera Hindia yang selama ini ia tuju sebagai zona ekonomi terbesar, sehingga proyek-proyek kerja sama itu harus berlanjut. Kepentingan-kepentingan ini yang menjadi alasan Cina untuk memilih kebijakan yang dianggap rasional dalam menyikapi Myanmar.

#### **4.2 Saran**

Pada penelitian ini penulis telah menjelaskan tentang analisis kepentingan Cina dalam kebijakannya terhadap Myanmar pasca kudeta tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan eksplanatif. Pembahasan yang tertulis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bahwa dalam penentuan kebijakan luar negeri ini dapat dianalisis dengan cara *rational choice theory* dan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama. Sehingga, saran untuk selanjutnya dapat menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan kebijakan internasional Cina terhadap Myanmar pasca kudeta tahun 2021.